

Konstruksi sosial realitas politik dalam media: Analisis berita surat kabar Pikiran Rakyat dan Metro Bandung mengenai calon gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2003 berdasarkan perspektif konstruksionisme

Yusuf Hamdan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111766&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia di era Orde Baru mengalami pengekangan dari pemerintah otoriter. Pers Indonesia yang hidup di dalamnya mengalami pengendalian ketat pada segi politik, dan mendapat perlakuan baik (secara ekonomi). Keadaan itu melahirkan pers yang berdaya secara ekonomi namun menurun secara politik.

Krisis ekonomi dan gerakan perlawanan yang dipelopori mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru.

Seraya Indonesia memasuki masa transisi yang tidak pasti. Nilai-nilai lama telah runtuh dan kehilangan basis moralnya akan tetapi tatanan baru belum terbentuk. Dalam keadaan demikian pers Indonesia

beroperasi dan menjalankan praktek jurnalismenya. Pemerintah pasca-Orde Baru menghadirkan sistem politik multipartai dan meliberalisasi kehidupan pers dengan melikuidasi Departemen Penerangan, organ pemerintah pengendali pers. Pers kini merasakan iklim yang longgar yang menumbuhkan harapan.

Pers hidup tidak dalam vacuum, perubahan sosial akan mempengaruhi, sebaliknya pers akan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Berdasarkan teori konstruksi sosial tentang realitas, studi ini melihat gejala itu dengan meneliti berita calon gubernur dalam masa pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2003 pada Pikiran Rakyat, yang pada masa Orde Baru dikenal pro Golkar, dan Metro Bandung, yang baru terbit pascagerakan reformasi yang diperkirakan pro PDI-P karena Grup Kompas sebagai pemilik secara historis terkait dengan PDI-P.

Teori konstruksi sosial tentang realitas dari Berger dan Luckmann, yang telah disesuaikan untuk meneliti isi media sebagai realitas simbolik oleh Adoni dan Manna, dioperasionalkan menggunakan analisis framing untuk melihat proses konstruksi berita sebagai isi media.

Hasil studi ini memperlihatkan ada perbedaan pembingkai (framing) pada kedua surat kabar mengenai realitas politik (calon gubernur). Bagi Pikiran Rakyat calon gubernur dibingkai sebagai masalah kedaerahan. Bingkai ini terlihat dari mengemukakan isu-isu mengenai rekrutmen calon pemimpin daerah (Sunda), serta kriteria pemimpin (calon gubernur) yang mengenal dan dikenal di Jawa Barat.

Sedangkan pada Metro Bandung, realitas politik (calon gubernur) dibingkai sebagai calon pemimpin yang harus memelihara etika politik. Bingkai ini terlihat mengedepankan pemberitaan isu-isu mengenai kasus dana kaveling (dugaan korupsi oleh anggota DPRD dan pejabat Pemda Jawa Barat), penggunaan taktik politik yang tidak etis, serta isu politik uang.

Strategi framing media dalam meliput realitas calon gubernur tersebut terkait dengan aspek internal dan eksternal media. Pada Pikiran Rakyat bingkai kedaerahan yang dikembangkan bukan semata ekspresi simbolik dari etnisitas melainkan berjalani dengan kepentingan ekonomi untuk meraih dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di Jawa Barat, yang memosisikan dirinya sebagai bacaan utama orang Sunda, penduduk mayoritas di Jawa Barat yang senantiasa mengklaim paling tabu Jawa Barat.

Strategi pembingkai (framing) Metro Bandung dalam berita calon gubernur diwarnai oleh keberadaannya sebagai pendatang baru di pasar pers Jawa Barat yang berusaha agar diterima sebagai bahan bacaan lain

untuk orang Jawa Barat dengan slogan the Real Local Paper, Metro Bandung tampak lebih tajam dalam mengungkapkan berita-berita mengenai pelanggaran etika politik oleh calon gubernur, beda dengan Pikiran Rakyat yang cenderung lebih santun. Posisinya sebagai surat kabar yang ingin senantiasa menyajikan informasi yang mikro kepada pembaca menyebabkan Metro Bandung tampak lebih tajam atau keras dari Pikiran Rakyat yang lebih santun.

Metro Bandung tidak mengidentifikasi diri dengan isu kedaerahan untuk diferensi dengan pesaing, karena Maim kedaerahan akan tampak tidak genuine baginya karena Metro Bandung dimiliki oleh bukan orang Jawa Barat. Keadaan demikian disebabkan pula oleh keberadaan "jaringan" berita oleh Persda yang dimiliki induk usaha, sehingga Metro Bandung lebih menasionai. Dugaan kedua surat kabar akan mengabdikan kepentingan partai terkait asal talon gubernur tidak terlihat kuat, karena pada kedua surat kabar hadir berita-berita yang dapat menguntungkan atau merugikan kedua kandidat.

Pikiran Rakyat memperlihatkan diri sebagai lembaga yang sedang melepaskan diri dari kungkungan politik ke wujud lembaga bisnis pers profesional yang nonpartisan. Sedangkan Metro Bandung sejak awal memahami dirinya sebagai lembaga yang berniat menjalankan bisnis pers yang bennotif mencari keuntungan dari pasar pers Jawa Barat.

Kekosongan sementara kekuasaan negara mengendalikan pers terlihat dari kedua surat kabar yang diteliti. Dalam praktek wacana pembuatan berita terlihat peran kapital semakin meningkat dan cukup mewarnai isi pemberitaan dan personalia pengelolanya yang ikut mengonstruksi realitas yang dimediasi.